
Received: 09 -06- 2024 | **Accepted:** 05-07-2024 **Published:** 16-08-2024

**KRITIK KONSEPTUAL TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN
INDONESIA*****Masti Yanto¹, Nailatur Rizqiyah², Nisa'el Amala³ Selfi Lailiyatul Iftitah⁴***¹) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura²) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura³) Dosen Universitas Islam Negeri Madura⁴) Dosen Universitas Islam Negeri MaduraEmail Korseponden: amalanisael@iainmadura.ac.id**Abstrak**

Manajemen pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, salah satunya adalah kesalahan konsep dalam penerapannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan konsep manajemen pendidikan yang sering terjadi di Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait, termasuk jurnal, buku, dan laporan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan konsep manajemen pendidikan di Indonesia meliputi ketidaktepatan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya serius untuk memperbaiki kesalahan konsep manajemen pendidikan melalui peningkatan pemahaman, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diajukan termasuk penguatan kurikulum manajemen pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan manajer, serta penerapan kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual.

Kata kunci: manajemen pendidikan, kesalahan konsep, kualitas pendidikan, Indonesia, perbaikan manajemen.

Abstract

Education management in Indonesia faces various significant challenges, one of which is conceptual errors in its implementation. This article aims to analyze the misconceptions about educational management that often occur in Indonesia and their impact on the quality of education. The research method used is a literature study by collecting data from various related sources, including journals, books and educational reports. The results of the analysis show that errors in the concept of education management in Indonesia include inaccuracies in planning, organizing, implementing and supervising. This article concludes that serious efforts are needed to correct misconceptions about educational management through increased understanding, training and continuous evaluation. The recommendations put forward include strengthening the education management curriculum, increasing the capacity of teaching staff and managers, as well as implementing policies that are more relevant and contextual.

Keywords: education management, conceptual errors, education quality, Indonesia, management improvement

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan terus mengalami perubahan dan pembaruan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal manajemen pendidikan (Al Faruq, U. (2020). Manajemen pendidikan yang efektif seharusnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Namun, beberapa kesalahan konsep dalam manajemen pendidikan di Indonesia telah menghambat tercapainya tujuan tersebut (Mustari, M. (2023). Artikel ini akan membahas kesalahan-kesalahan konsep tersebut, dampaknya, serta solusi yang dapat diimplementasikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan suatu negara. Namun, di Indonesia, terdapat beberapa kesalahan konsep dalam penerapan manajemen pendidikan yang menghambat optimalisasi kualitas pendidikan. Salah satu kesalahan konsep yang paling menonjol adalah pendekatan yang terlalu birokratis dan sentralistik, di mana kebijakan pendidikan seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik di tingkat sekolah (Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Hal ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungannya. Selain itu, manajemen pendidikan di Indonesia seringkali lebih fokus pada aspek administratif dan kuantitatif, seperti pencapaian target nilai ujian nasional, daripada mengutamakan proses pembelajaran yang holistik dan bermakna. Akibatnya, pendidikan cenderung menjadi mekanis dan kurang memfasilitasi pengembangan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, serta karakter peserta didik (Duryat, H. M., & Sahrodi, H. J. (2021). Kesalahan konsep lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam proses pembelajaran. Tanpa dukungan yang memadai, guru seringkali kesulitan mengimplementasikan inovasi pedagogis dan menghadapi tantangan di kelas (Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap konsep manajemen pendidikan di Indonesia agar lebih inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan tujuan utama menganalisis kesalahan konsep dalam manajemen pendidikan di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Metode ini dipilih karena memberikan ruang yang luas untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber akademik, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara mendalam teori, temuan empiris, serta pandangan kritis dari para ahli untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi

dalam penerapan manajemen pendidikan. Dengan demikian, studi literatur berperan sebagai dasar yang kuat untuk memahami permasalahan secara komprehensif dan menghubungkannya dengan konteks nyata pendidikan di Indonesia.

Selain itu, metode studi literatur juga memungkinkan adanya sintesis gagasan yang lebih sistematis sehingga kesalahan konsep dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan manajemen pendidikan dapat dipetakan dengan jelas. Analisis ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga menekankan pada interpretasi mendalam mengenai implikasi dari kesalahan konsep tersebut terhadap mutu pendidikan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh yang bermanfaat bagi pengembangan strategi perbaikan manajemen pendidikan di Indonesia, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesalahan Konsep Sentralisasi vs Desentralisasi

Salah satu kesalahan konsep manajemen pendidikan di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan sangat tersentralisasi, di mana kebijakan dan kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat (Fauzan, M. A., & Arifin, F. (2022)). Setelah era reformasi, desentralisasi pendidikan digulirkan, tetapi implementasinya seringkali tidak tepat. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam memahami kedua konsep ini (Haryadi, H. (2009)). Sentralisasi merujuk pada sistem di mana keputusan dan kendali berada di tangan otoritas pusat, sementara desentralisasi membagi wewenang ke berbagai tingkat atau unit dalam organisasi atau sistem. Salah satu kesalahan konsep yang umum adalah anggapan bahwa sentralisasi selalu buruk dan desentralisasi selalu baik (Alim, M. S. (2024)). Faktanya, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung konteksnya. Sentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis atau ketika diperlukan koordinasi yang ketat. Namun, sentralisasi juga dapat menimbulkan birokrasi yang lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Di sisi lain, desentralisasi dianggap lebih demokratis dan fleksibel karena mendekatkan pengambilan keputusan kepada mereka yang paling terdampak. Namun, desentralisasi juga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan, tumpang tindih wewenang, dan kesulitan dalam koordinasi (Suryono, A. (2011)). Kesalahan konsep lainnya adalah menganggap bahwa sentralisasi dan desentralisasi bersifat mutlak. Pada kenyataannya, banyak organisasi atau sistem yang mengadopsi pendekatan hybrid, menggabungkan elemen sentralisasi dan desentralisasi untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Pemahaman yang tepat tentang kedua konsep ini penting untuk menentukan pendekatan yang paling efektif dalam berbagai situasi (Marsudi, K. E. R. (2020)).

Kurikulum yang Terlalu Sering Berubah

Perubahan kurikulum yang terlalu sering tanpa evaluasi mendalam merupakan kesalahan konsep manajemen pendidikan yang signifikan. Contohnya, perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013, dan kemudian revisi-revisi berikutnya. Kurikulum yang terlalu sering berubah dapat menjadi tantangan bagi sistem pendidikan, guru, siswa, dan orang tua. Perubahan kurikulum umumnya dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan industri, serta tuntutan globalisasi. Namun, jika perubahan dilakukan terlalu sering tanpa evaluasi yang matang, justru dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam proses belajar-mengajar (Mulyasa, H. E. (2021). Salah satu dampaknya adalah kebingungan di kalangan guru yang harus terus-menerus menyesuaikan metode pengajaran, perangkat ajar, dan penilaian. Hal ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran karena mereka membutuhkan waktu untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru dengan baik. Siswa juga dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, terutama jika perubahan kurikulum berdampak pada sistem evaluasi atau materi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya (Jayadih, M., Suhardi, H. E., & Rubini, B. (2024). Selain itu, perubahan kurikulum yang terlalu cepat dapat membebani anggaran pendidikan karena memerlukan pelatihan ulang bagi guru, pengadaan buku baru, serta penyesuaian infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan semua pihak yang terlibat serta hasil evaluasi yang komprehensif, agar pendidikan tetap berjalan dengan stabil dan efektif.

Ketergantungan pada Ujian Nasional (UN)

Meskipun Ujian Nasional telah dihapus, ketergantungan pada UN sebagai satu-satunya alat evaluasi pendidikan selama bertahun-tahun merupakan kesalahan konsep yang besar. Ketergantungan pada Ujian Nasional (UN) merujuk pada praktik pendidikan yang terlalu mengandalkan hasil ujian sebagai tolok ukur utama keberhasilan belajar siswa. Dalam sistem ini, UN menjadi faktor penentu kelulusan, evaluasi mutu pendidikan, bahkan syarat masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Akibatnya, banyak sekolah dan siswa lebih berfokus pada persiapan menghadapi ujian daripada membangun pemahaman yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis (Alawiyah, F. (2015). Ketergantungan ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tekanan psikologis bagi siswa, praktik pembelajaran yang lebih menekankan hafalan daripada pemecahan masalah, serta ketimpangan pendidikan karena sekolah berlomba-lomba meningkatkan nilai ujian dengan berbagai cara, termasuk bimbingan intensif dan latihan soal yang berulang (Baedowi, A. (2015). Selain itu, UN kurang mempertimbangkan keberagaman potensi siswa serta perbedaan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Sebagai respons

terhadap permasalahan ini, beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya menggantikan UN dengan sistem evaluasi yang lebih komprehensif, seperti Asesmen Nasional (AN) yang lebih menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter. Dengan demikian, pendidikan dapat lebih berorientasi pada pembentukan kompetensi nyata daripada sekadar pencapaian nilai ujian.

Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, namun pelatihan dan pengembangan guru seringkali diabaikan. Minimnya pelatihan dan pengembangan guru menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, sehingga keterampilan mereka harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman (Oktapia, M. (2024). Namun, banyak guru di berbagai daerah menghadapi keterbatasan dalam mengakses pelatihan yang relevan dan berkualitas. Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pelatihan guru antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, dan kebijakan yang belum optimal dalam mendukung pengembangan profesional. Selain itu, tidak semua guru memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya program berkelanjutan dari pemerintah maupun lembaga pendidikan. Dampak dari kurangnya pelatihan ini cukup signifikan (Azri, A., & Raniyah, Q. (2024). Guru yang tidak mendapatkan pengembangan profesional cenderung menggunakan metode pengajaran yang kurang inovatif, sulit menyesuaikan diri dengan kurikulum terbaru, dan kurang mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Akibatnya, kualitas pembelajaran di kelas menjadi kurang optimal dan dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, baik melalui workshop, seminar, maupun platform digital. Dengan demikian, guru dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi siswa.

Ketimpangan Akses Pendidikan

Kesalahan konsep manajemen pendidikan juga terlihat dari ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan akses pendidikan merupakan perbedaan kesempatan bagi individu atau kelompok dalam memperoleh pendidikan yang layak. Ketimpangan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, geografis, sosial, dan kebijakan pemerintah Trisnawati, (O., & Widiensyah, S. (2022). Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses sekolah berkualitas karena biaya pendidikan, kebutuhan ekonomi keluarga, atau kurangnya fasilitas pendidikan di daerah mereka. Di daerah terpencil, ketimpangan akses semakin nyata akibat minimnya infrastruktur, seperti

sekolah yang jauh, kurangnya tenaga pendidik, serta keterbatasan akses internet dan teknologi. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan perempuan di beberapa daerah juga menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara. Ketimpangan akses pendidikan berdampak luas terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial (Maulana, I. R. (2023).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang inklusif, seperti peningkatan subsidi pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua.

Manajemen Anggaran yang Tidak Efektif

Alokasi anggaran pendidikan yang besar (20% dari APBN) seringkali tidak dikelola dengan efektif. Manajemen anggaran pendidikan yang tidak efektif merujuk pada ketidaktepatan dalam perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan dana pendidikan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal (Jamilah, J. (2023). Salah satu penyebab utama adalah perencanaan yang kurang matang, seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan anggaran yang disediakan. Akibatnya, terjadi pemborosan pada sektor tertentu sementara sektor lain kekurangan dana. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor penting. Misalnya, adanya praktik korupsi, mark-up harga barang, atau penggunaan dana untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan tenaga pendidik malah terbuang sia-sia. Ketidakefektifan juga dapat terlihat dari rendahnya evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran. Tanpa pengawasan yang baik, alokasi dana sering kali tidak sesuai dengan prioritas utama pendidikan, seperti peningkatan kurikulum, pelatihan guru, atau penyediaan teknologi pembelajaran. Dampak dari manajemen anggaran yang tidak efektif adalah menurunnya kualitas pendidikan, ketimpangan akses pendidikan, serta rendahnya motivasi guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem anggaran yang lebih transparan, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata (Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024)

Fokus pada Kuantitas daripada Kualitas

Kesalahan konsep lain adalah fokus pada kuantitas, seperti jumlah sekolah dan siswa, tanpa memperhatikan kualitas pendidikan. Pendekatan yang lebih menekankan kuantitas daripada kualitas dalam pendidikan sering kali terjadi ketika lembaga

pendidikan lebih memperhatikan jumlah lulusan, banyaknya materi yang diajarkan, atau banyaknya tugas dan ujian yang diberikan, dibandingkan dengan pemahaman mendalam dan kompetensi siswa (Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Sistem seperti ini sering kali muncul karena tekanan untuk memenuhi standar administratif, akreditasi, atau target tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi pendidikan. Dampaknya, siswa lebih cenderung menghafal materi tanpa benar-benar memahami konsep secara mendalam. Selain itu, beban tugas yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berpikir kritis, berinovasi, dan mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan dunia nyata. Dalam jangka panjang, sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada kuantitas dapat menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Idealnya, pendidikan harus menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas, di mana jumlah materi dan tugas yang diberikan tetap relevan dan mendukung pemahaman mendalam. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya sekadar menyelesaikan pendidikan, tetapi juga memiliki keterampilan, wawasan, dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka (Nainggolan, E. T. A., Tambunan, A. M., Panggabean, J. Z. Z., Ardiansyah, W., Putra, P. P., Aspiyana, T., ... & Sari, I. K. (2024).

Kebijakan yang Tidak Berkelanjutan

Banyak kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan dan berubah seiring pergantian pemerintahan. Kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan merujuk pada kebijakan yang tidak dirancang untuk jangka panjang dan sering kali berubah tanpa kajian mendalam. Kebijakan semacam ini dapat menghambat perkembangan sistem pendidikan, menyebabkan ketidakpastian bagi pendidik, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu contoh kebijakan yang tidak berkelanjutan adalah perubahan kurikulum yang terlalu sering tanpa evaluasi yang matang. Hal ini membuat guru kesulitan beradaptasi dan siswa kehilangan kontinuitas dalam pembelajaran (Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Selain itu, kebijakan rekrutmen guru yang tidak konsisten, seperti pengangkatan tenaga honorer tanpa kejelasan status jangka panjang, juga menciptakan ketidakpastian dalam kualitas pendidikan. Faktor lain adalah kurangnya investasi dalam infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan teknologi yang mendukung pembelajaran digital. Jika pemerintah hanya fokus pada solusi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, maka kesenjangan pendidikan akan semakin melebar. Untuk mencapai sistem pendidikan yang berkelanjutan, kebijakan harus berbasis riset, melibatkan berbagai pihak, dan memiliki visi jangka panjang. Dengan demikian, pendidikan dapat terus berkembang secara konsisten dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang (Zein, M. H. M. (2023).

KESIMPULAN

Kesalahan konsep dalam manajemen pendidikan di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang tidak hanya memengaruhi efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada mutu hasil belajar peserta didik. Ketidaktepatan dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan membuat kebijakan pendidikan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana tujuan pendidikan nasional sulit tercapai secara optimal. Hambatan tersebut semakin kompleks ketika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik dari para pengelola pendidikan, sehingga praktik manajemen pendidikan justru menjadi kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas sistem pendidikan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan evaluasi menyeluruh yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, manajer pendidikan, hingga masyarakat. Perbaikan konsep manajemen pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Dengan adanya keselarasan antara teori, praktik, dan kebijakan, kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan dapat meningkat signifikan. Hal ini akan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global serta menjadikan sistem pendidikan Indonesia lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

REFERENSI

- Al Faruq, U. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan Muhammadiyah di era 4.0. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 013-030.
- Mustari, M. (2023). *Teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pendidikan*. Gunung Djati Publishing Bandung.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1)*. Sah Media.
- Duryat, H. M., & Sahrodi, H. J. (2021). *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi: (Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)*. K-Media.
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzan, M. A., & Arifin, F. (2022). *Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21*. Prenada Media.
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.

- Haryadi, H. (2009). Administrasi perkantoran untuk manajer & staf. VisiMedia.
- Suryono, A. (2011). Manajemen Sumberdaya Manusia: Etika dan Standar Profesional Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press.
- Marsudi, K. E. R. (2020). Analisis Isi Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Kurikulum 2013. Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad, 21, 68.
- Mulyasa, H. E. (2021). Implementasi kurikulum 2013 revisi: dalam era industri 4.0. Bumi Aksara.
- Jayadih, M., Suhardi, H. E., & Rubini, B. (2024). Strategi & peningkatan kualitas layanan guru: Transformasi melalui kepemimpinan, teknologi, kreativitas dan entrepreneurship. Jakad Media Publishing.
- NEGARA, P. T. (2014). Kebijakan publik.
- Alawiyah, F. (2015). Perubahan kebijakan ujian nasional (studi pelaksanaan ujian nasional 2015). Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 6(2), 189-202.
- Baedowi, A. (2015). Potret pendidikan kita. Pustaka Alvabet KEBIJAKAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM. Dharmas Education Journal (DE_Journal), 5(2), 972-979.
- Oktapia, M. (2024). PENERAPAN PRINSIP ETIKA PROFESI DALAM MANAJEMEN KINERJA GURU DI SEKOLAH ISLAM. UNISAN JURNAL, 3(2), 524-535.
- Azri, A., & Raniyah, Q. (2024). Peran Teknologi Dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 3(4), 4859-4884.
- Trisnawati, O., & Widiensyah, S. (2022). Kesenjangan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 13(2), 339-347.
- Maulana, I. R. (2023). KESENJANGAN SOSIAL DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN: TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. literacy notes, 1(2).
- Jamilah, J. (2023). Dinamika Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sd Negeri Gugus I Kecamatan Sukadana Tahun 2021. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(5), 352-374.
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 4(4), 1723-1732.
- Pratiwi, I. (2021). IPA untuk Pendidikan guru sekolah dasar (Vol. 1). umsu press.
- Nainggolan, E. T. A., Tambunan, A. M., Panggabean, J. Z. Z., Ardiansyah, W., Putra, P. P., Aspiyana, T., ... & Sari, I. K. (2024). Manajemen Pendidikan: Pengelolaan SDM untuk meningkatkan standar pendidikan. PT. Green Pustaka Indonesia.

- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.